

Kriteria Kemiskinan Masyarakat Desa Pesisir dan Masyarakat Desa Dataran Tinggi yang Sulit Ditentukan

Fairuz Tsina*

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

ABSTRAK: Poverty is still a problem for the Indonesian people, the article is that there is no right solution for alleviating it. Plus the criteria for poor that are difficult to determine are a challenge for the government to synergize with each other in updating its data. In this case, the Ministry of Social Affairs provides an opportunity for students to directly contribute to the implementation of DTKS verification and validation activities as a strategy to empower the community. For the upland village community, which is difficult to determine, the solution given by the author regarding the criteria for poverty which is difficult to determine is to look at the geographical conditions of an area and also the background of the community so that the criteria for poverty are not the same between one region and another.

Riwayat Artikel

Received: 17-08-2023

Accepted: 18-08-2023

Kata Kunci

Criteria, Poverty, Rural Community

Pendahuluan

Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Tolok ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil di muka hukum dan sebagainya (Adisasmita,2015).

Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mengenai tingkat kemiskinan di perkotaan Indonesia pada tahun 2021 Semester 2 bulan September berjumlah 11. 859,34 sedangkan di perdesaan jumlahnya mencapai 14. 644,30. Dari sini kita bisa melihat bahwa permasalahan kemiskinan di desa jumlahnya lebih banyak. Padahal jika mau digali lebih dalam desa juga

CONTACT: Fairuz Tsina ✉ tsinafairuz@gmail.com

© 2023 The Author(s). Published by Literasi Nusantara Publisher.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi salah satu solusi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Untuk potensi desa sendiri dibedakan menjadi 2 yang pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Tentu saja upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara menuntaskan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui program MBKM yang diaktualkan melalui program magang Pejuang Muda, dalam kegiatan ini mahasiswa melakukan kegiatan belajar diluar perguruan tinggi diantaranya melaksanakan pengabdian masyarakat di desa dengan cara melakukan verifikasi dan validasi data DTKS terhadap Keluarga Penerima Manfaat PKH dan BPNT yang bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2: "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan. Asas partisipasi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut, adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, dengan demikian peran mahasiswa ketika terjun langsung ke wilayah-wilayah yang ada di Indonesia adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat serta dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, pemuka masyarakat, tokoh agama setempat dan stakeholder.

Metode

Pengamatan yang dilakukan terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat desa pesisir dan masyarakat desa dataran tinggi adalah ketika penulis melakukan verifikasi dan validasi data DTKS. Penulis dan Tim Pejuang Muda Kabupaten Rembang mendapatkan data awal (DTKS) dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) sebanyak 1.000 data pada tanggal 1 November 2021 lalu data ke dua turun sebanyak 10.000 data pada tanggal 10 November 2021. Dan dari keseluruhan data yang jumlahnya mencapai 11.000, Tim Pejuang Muda Kabupaten Rembang mendapatkan jatah verifikasi dan validasi data DTKS di 4 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Kaliore

Untuk metode pelaksanaannya Tim Pejuang Muda Kabupaten Rembang melakukan sosialisasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari program Pejuang Muda, sekaligus meminta perizinan untuk memasuki wilayah-wilayah yang ada di kabupaten Rembang. Setelah itu penulis dan Tim Pejuang Muda Kabupaten Rembang melakukan perizinan ke Kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi DTKS di desa-desa yang berada dibawah wilayah administratif Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan, Kecamatan Gunem dan Kecamatan Kaliore. Setelah selesai melakukan perizinan ke Kecamatan, penulis dan Tim Pejuang Muda juga melakukan perizinan ke setiap desa yang akan di verifikasi dan di validasi DTKS nya

serta meminta kepada kepala desa yang bersangkutan untuk membantu pelaksanaannya dalam hal pendampingan karena kegiatan dari verifikasi dan validasi DTKS ini sifatnya *door to door* maka pendampingan yang diberikan oleh perangkat desa atau pemangku kepentingan akan sangat membantu proses pelaksanaan pendataan. Ketika melakukan perizinan baik ke Kecamatan ataupun ke Desa, penulis dan Tim Pejuang Muda juga tidak lupa menyerahkan surat permohonan, surat tugas dan surat perintah sebagai bukti bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS ini sifatnya resmi, selain itu SPD atau Surat Perjalanan Dinas juga disiapkan untuk diserahkan ke Kementerian Sosial sebagai bukti telah melakukan perjalanan atau telah melakukan verifikasi dan validasi ke satu Kecamatan atau Desa.

Penerima bantuan PKH dan BPNT menjadi target verifikasi dan validasi DTKS yang dimana kedua program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses verifikasi dan validasi ini berpacu pada data yang telah diberikan oleh Pusdatin dengan menggunakan aplikasi SAGIS, untuk variabel data yang diperlukan mencakup NIK (Nomor Induk Keluarga), Nama, Penghasilan selama seminggu terakhir, Pekerjaan, Kondisi rumah seperti listrik, lantai, tembok, dan kamar mandi lalu melakukan foto rumah menggunakan geo-tagging.

Secara garis besar metode pelaksanaannya memang dilakukan ketika proses kegiatan verifikasi dan validasi DTKS bersama Tim Pejuang Muda Kabupaten Rembang namun untuk pengamatan atau observasi pada Kriteria Kemiskinan Masyarakat Desa Pesisir dan Masyarakat Desa Dataran Tinggi yang Sulit Ditentukan, dilakukan sendiri oleh penulis, dengan kata lain penulis melakukan pengamatan beririsan ketika melakukan verifikasi dan validasi DTKS.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pengamatan yang penulis dapatkan sewaktu melakukan verifikasi dan validasi DTKS adalah tingkat kemiskinan masyarakat di Desa masih menjadi persoalan yang konkret dan perlu solusi yang tepat untuk menanganinya. Dalam PSE05 (Pendataan Sosial-Ekonomi Penduduk Tahun 2005), sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila:

1. luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
2. lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
8. hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;

12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan;
13. pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Penulis melakukan pengamatan terhadap permasalahan kriteria kemiskinan masyarakat desa pesisir dan masyarakat desa dataran tinggi, hal ini bisa dilakukan karena penulis mendapatkan data DTKS di 4 Kecamatan yang dimana secara geografis letak 2 Kecamatan ini berada di wilayah pesisir yaitu Kecamatan Kaliore dan Kecamatan Kragan sedangkan 2 Kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem berada di wilayah dataran tinggi.

Verifikasi dan Validasi DTKS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia beberapa diantaranya melalui program bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan verifikasi dan validasi di desa pesisir masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan buruh di tambak garam atau buruh di tempat pelelangan ikan. Sedangkan di desa dataran tinggi sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan peternak. Dalam penulisan ilmiah yang ditulis oleh Yulianto Kadji seorang Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG menyebutkan bahwa Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis (gepeng), dan pengangguran.

Kemudian persoalan mengenai kemiskinan menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain disebabkan oleh kompleksnya persoalan yang ada lantaran kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki karakteristik berbeda-beda. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa di antaranya berada di wilayah pesisir.

Berdasarkan narasi diatas mengenai permasalahan kemiskinan yang sangat tinggi di Indonesia tentu menjadi persoalan yang harus segera ditangani oleh pemerintah, namun untuk menentukan kriteria kemiskinan yang ada di Indonesia sangatlah sulit, contohnya ketika penulis melakukan verifikasi dan validasi data sekaligus melakukan pengamatan terhadap kondisi kemiskinan yang terjadi ketika berada di desa pesisir dan ketika berada di desa dataran tinggi, permasalahan dari masyarakat desa tersebut adalah sama-sama berstatus miskin itulah mengapa data atau nama mereka masuk ke dalam data DTKS Pusdatin dan di lakukanlah kegiatan verifikasi dan validasi tersebut, tetapi dalam pelaksanaan pendataanya pertanyaan atau *questioner* yang tersedia di aplikasi SAGIS sifatnya sangat umum dan tidak spesifik maka

ketika melakukan pengamatan itu sering di temui bahwa sebenarnya ada kriteria miskin yang sulit ditentukan yang terjadi di masyarakat.

Ketika penulis melakukan verifikasi dan validasi DTKS sekaligus melakukan pengamatan terhadap permasalahan kemiskinan masyarakat desa pesisir, dari segi rumah mereka cenderung memiliki rumah yang lebih layak bahkan cukup mewah tetapi dari segi tabungan atau barang masyarakat pesisir cenderung tidak memilikinya, sebaliknya masyarakat desa di dataran tinggi rata-rata rumah nya sangat tidak layak seperti tidak tersedianya kamar mandi, lantai yang berupa tanah dan dindingnya pun masih menggunakan bambu tetapi dari segi tabungan atau barang mereka cenderung memiliki hewan ternak dan juga sawah. Kondisi ini tentu saja menjadi salah satu permasalahan ketika pelaksanaan pendataan, karena tidak adanya kriteria miskin yang akurat bagi masyarakat Indonesia yang memang berstatus miskin, selain kriteria miskin yang belum akurat data DTKS mengenai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dan BPNT juga belum akurat dan masih banyak ditemui masalah-masalah data yang tidak valid dan belum diperbarui.



Gambar 1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS sekaligus pengamatan terhadap masalah kemiskinan yang terjadi.

Terkait persoalan ini, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB, Prof. Dr. Ali Khomsan menyoroti data penerima bantuan yang tak pernah diperbarui sejak 2015, selain itu Prof. Dr. Ali Khomsan juga menyoroti mengenai kemiskinan yang sulit di tentukan contohnya ketika pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdesaan (Permendes) No 6 Tahun 2020, dalam hal ini banyak kepala desa yang kesulitan menentukan bantuan berdasarkan peraturan tersebut, karena kriteria dalam peraturannya cocok untuk orang yang sangat melarat hidupnya. Sementara yang perlu bantuan, apalagi saat pandemi adalah orang yang kehilangan pekerjaan atau cukup masuk kategori miskin menurut kriteria BPS, Sehingga meski tidak miskin, mereka rentan terhadap kemiskinan. Prof. Dr. Ali Khomsan juga menegaskan bahwa penggunaan garis kemiskinan yang terlalu rendah dapat memunculkan angka kemiskinan yang keliru. Banyak orang akan

terklasifikasi tidak miskin padahal sangat menderita, maka indikator kemiskinan juga diperlukan untuk menghasilkan data yang akurat.

Sementara itu sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, menurut Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa.

Sehubungan dengan narasi di atas dan berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai kriteria kemiskinan yang terjadi di masyarakat desa pesisir dan masyarakat desa dataran tinggi yang sulit ditentukan memang menjadi persoalan yang belum bisa terselesaikan, bahkan untuk kriteria miskin secara umum pun masih sulit ditentukan, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kriteria kemiskinan bisa dibuat berdasarkan letak geografis wilayah tempat tinggal masyarakat dan latar belakang dari masyarakat tersebut sehingga kategori atau kriteria miskin antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak di samaratakan. Sedangkan menurut pakar IPB Prof. Dr. Ali Khomsan berpendapat bahwa upaya untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui indikator kemiskinan diantaranya adalah status janda tanpa pekerjaan, pendidikan kepala rumah tangga rendah, kecilnya luas lantai rumah dan tidak adanya fasilitas buang air besar. Kemudian dalam hal penanganan kemiskinan sendiri keakuratan serta pemutakhiran data DTKS menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

Untuk menjawab persoalan yang sangat kompleks ini karena berkaitan dengan data DTKS dan kriteria kemiskinan yang sulit di tentukan maka menurut Ade Rustama, poin yang perlu diperhatikan Kementerian atau Lembaga dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah masing-masing Kementerian atau Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. Dengan begitu persoalan mengenai kriteria kemiskinan yang sangat sulit di tentukan akibat tidak akurat nya data yang ada hari ini bisa diatasi dengan baik karena kementrian atau lembaga saling bersinergi satu sama lainnya.

Simpulan

Permasalahan kemiskinan yang terjadi hari ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sendiri untuk sama-sama menemukan solusi terbaik dalam pengentasannya, upaya-upaya terus dilakukan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan yang terjadi, salah satunya dengan melibatkan mahasiswa melalui program magang Pejuang Muda untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data DTKS dengan begitu Kementerian Sosial mendapatkan gambaran umum mengenai bagaimana cara atau upaya yang akan diberikan dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial. Mahasiswa juga

mendapatkan pengalaman langsung untuk melakukan pengamatan terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian untuk permasalahan Kriteria Kemiskinan Masyarakat Desa Pesisir dan Masyarakat Desa Dataran Tinggi yang Sulit Ditentukan memang menjadi salah satu permasalahan yang cukup pelik, bahkan secara umum pun belum ada kriteria yang akurat mengenai masyarakat miskin, untuk itu sinergi antar Kementerian atau Lembaga menjadi salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan.

Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah mengadakan program magang Pejuang Muda, Pemangku Kepentingan Kabupaten Rembang, Mentor Internal, Koordinator Kabupaten Rembang, Tim Pejuang Muda Kabupaten Rembang, TKSK, serta Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMJ yang turut mendukung pelaksanaan program magang Pejuang Muda ini.

Referensi

- Ferezagia, D.V., (2018). "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1. <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/view/6>. Diakses pada 25 Januari 2022.
- Kadji, Y., (2013). "Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya". https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/318/Kemiskinan_dan_Konsep_Teroitisnya.pdf. Diakses pada 25 Januari 2022
- Badan Pusat Statistik., <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses pada 25 Januari 2022.
- Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi. (2016). "Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota". *Kertas Kerja Semeru*. The SMERU Research Institue. http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cbms_criteria_ind.pdf.
- Adit, A., (2021). "Kriteria Miskin Sulit Ditentukan, Begini Penjelasan Pakar IPB". <https://edukasi.kompas.com/read/2021/02/02/144118671/kriteria-miskin-sulit-ditentukan-begini-penjelasan-pakar-ipb?page=all>. Diakses pada 25 Januari 2022.
- Haetami, Heru., (2021). "Angka Kemiskinan di Wilayah Pesisir Lebih Tinggi dan Kompleks, Upaya Pemerintah?.". https://kbr.id/nasional/122021/angka_kemiskinan_di_wilayah_pesisir_lebih_tinggi_dan_kompleks_upaya_pemerintah_/107146.html, Diakses pada 25 Januari 2022.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia., (2022). "Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat". <https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat>. Diakses pada 25 Januari 2022.